

**TESIS**

**PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA  
DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR  
ANTARA DEBITOR DENGAN KREDITOR**



**PRO PATRIA**  
Oleh:

**DIDIT ATIM PRAMITA**

NIM: 12112008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2016**

## ABSTRAK

Sejak berlakunya UU Fidusia, maka penyerahan hak milik secara fidusia oleh debitor kepada kreditor, tentunya harus memenuhi syarat yang diatur dalam UU Fidusia, yaitu harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dalam hal debitor mengalami keterlambatan pembayaran, pihak kreditor dengan menunjukkan Sertifikat Fidusia langsung melakukan penarikan kendaraan bermotor dari tangan debitor. Padahal berdasarkan pengakuan pihak debitor, bahwa dirinya tidak pernah datang menghadap pada seorang Notaris untuk menandatangani perjanjian jaminan fidusia. Oleh karena tidak ada akta fidusia yang dibuat oleh notaris, tentunya tidak akan pernah ada Sertifikat Jaminan Fidusia.

Permasalahan yang akan dikaji adalah: Bagaimanakah praktik perjanjian jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor antara debitor dengan kreditor? Dan Bagaimana keabsahan sertifikat fidusia pada pembelian kendaraan bermotor dengan adanya pemberian kuasa oleh debitor kepada kreditor yang dibuat di bawah tangan?

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil pembahasan dari permasalahan tesis ini adalah praktik perjanjian jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor hanya dilakukan di bawah tangan tanpa adanya peran notaris sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia yang mengharuskan perjanjian jaminan fidusia dituangkan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Sertifikat jaminan fidusia pada pembelian kendaraan bermotor dengan adanya pemberian kuasa oleh debitor kepada kreditor yang dibuat di bawah tangan dengan sendirinya tidak sah, karena sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan pendaftaran akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris.

Kata kunci : Fidusia, Jual-beli, Kreditor-Debitor

## **ABSTRACT**

*Since the enactment of Law Fiduciary, the delivery of property rights in a fiduciary by the debtor to the creditor, must fulfill the conditions stipulated in the Act Fiduciary, which must be set forth in an authentic deed made by the notary. In the case of delayed payment the debtor, the creditor to show Fiduciary Certificates directly withdraw the motor vehicle from the hands of the debtor. Though based on the recognition of the debtor, that he had never come at a Notary to sign a fiduciary agreement. Therefore there is no fiduciary deed made by the notary, of course, there will never Fiduciary Certificates.*

*Issues to be examined are: How does the practice of fiduciary agreement in the purchase of motor vehicles between the debtor to the creditor? And How validity of fiduciary certificates on the purchase of motor vehicles with their authorization by the debtor to the creditor who made underhand?*

*This type of research in this thesis is a normative juridical research type, study on the legislation in force and no relation to the issues discussed. Legislation in question is Law No. 42 of 1999 about Fiduciary. The approach used in this study is the approach of legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach).*

*Results of the discussion of the problems of this thesis is the practice of fiduciary agreement in the purchase of motor vehicles is only done under the hand without the role of the notary as required by Article 5, paragraph (1) of the Act which requires agreement Fiduciary fiduciary poured authentic deed made by the notary. Certificate of fiduciary guarantee on the purchase of motor vehicles with their authorization by the debtor to the creditor made under hand by itself is not valid, because the fiduciary guarantee certificate issued by the Registry Office Fiduciary based registration fiduciary deed made by the notary.*

**Keywords :** *Fiduciary , Buying and selling , Creditor - Debtor*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4. Kajian Pustaka .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	23
1.6. Sistematika Penulisan .....	25
BAB II : PRAKTIK PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PADA PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR .....	27
2.1. Hubungan Hukum Para Pihak .....	27
2.2. Perjanjian Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan .....	37
2.3. Kekuatan Mengikat Perjanjian Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan .....	44
BAB III : KEABSAHAN DAN KONSEKUENSI SERTIFIKAT FIDUSIA BERDASARKAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN .....	49
3.1. Keabsahan Sertifikat Fidusia .....	49
3.2. Konsekuensi Hukum Sertifikat Fidusia .....	52



3.3. Upaya Kreditor Dalam Hal Debitor Wanprestasi .....	58
BAB IV: PENUTUP .....	64
4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Saran .....	65
DAFTAR BACAAN	



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktik perjanjian jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor antara debitor dengan kreditor hanya dilakukan di bawah tangan tanpa adanya peran notaris sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 yang mengharuskan perjanjian jaminan fidusia harus dituangkan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Pihak kreditor telah menyiapkan aplikasi atau form perjanjian baku yaitu perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditor, dan pihak debitor hanya tinggal menandatangani form perjanjian jaminan tersebut.
- b. Keabsahan sertifikat jaminan fidusia pada pembelian kendaraan bermotor dengan adanya pemberian kuasa oleh debitor kepada kreditor yang dibuat di bawah tangan, dengan sendirinya tidak sah, karena sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan pendaftaran akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Oleh karena akta jaminan fidusia tidak pernah ada karena perjanjian jaminan fidusia antara debitor dengan kreditor

hanya dibuat di bawah tangan, jelas tidak mungkin ada akta fidusia yang akan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Oleh karena Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 mensyaratkan perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, seyogyanya pemerintah melalui institusi terkait melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor dengan maksud agar pihak kreditor yaitu lembaga pembiayaan membuat perjanjian jaminan fidusia dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris sehingga akan diperoleh kepastian hukum bagi para pihak.
- b. Apabila terbukti ada perjanjian jaminan fidusia yang hanya dibuat di bawah tangan dan pihak kreditor melakukan penarikan jaminan berupa kendaraan bermotor dari tangan debitor dengan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, seyogyanya ada penerapan sanksi pidana pemalsuan, karena tanpa adanya akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tentunya tidak akan mungkin terbit sertifikat jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- \_\_\_\_\_. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Cet. XII, Intermasa.
- \_\_\_\_\_. (1991). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Cet. XXVII, Intermasa.
- \_\_\_\_\_. (1996). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Edisi Kedua, Cet. I, Alumni.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Hukum Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, M.D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Cet. I, Alumni.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2003). *Jaminan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philips M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Penerbit Bina Ilmu.
- HS. Salim, (2007). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, & Sukanti A. (2006). *Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*. Jakarta.
- Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.



- Marzuki, & Mahmud, P. (2013). *Penelitian Hukum, (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, & Mahmud P. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum ,(Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad D. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Patrik, Purwahid, dan Kashadi. (2008). *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prajitno, A.A. Andi. (2009). *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009*. Malang : Bayumedia.
- Purnamasari, Irma Devita. (2011). *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung : Kaifa.
- Raharjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Salim. (2005). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Cet. III, Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2005). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Cet. V, Binacipta.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudargo, G. (1973). *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1997). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Syahrani, R. (2004). *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Edisi Kedua, Cet. I, Alumni.

Tanuwidjaja, Henny. (2012). *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Bandung : Refika Aditama.

Tobing, L. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.

Usman, Rachmadi. (2009). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Widjaja, G, & Yani, A. (2000). *Seri Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widjaja, G. & Yani, A. (2003). *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

## **II. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.